



PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH

-----Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.-----



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

Pengukuran Kinerja Pemerintah

Copyright @2025 by Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) 081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Lailatul Nur Ula

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

ISBN

978-634-278-038-1

15,5 x 23 cm, viii + 360 halaman

Cetakan ke-1, Januari 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com> | www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia | @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul **"Pengukuran Kinerja Pemerintah"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, aparatur pemerintah, serta para pemerhati tata kelola sektor publik di Indonesia.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result-oriented government*), pengukuran kinerja menjadi instrumen yang sangat penting. Tidak hanya sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek dalam pengukuran kinerja pemerintah, mulai dari konsep dasar, tujuan, model dan pendekatan, hingga sistem dan instrumen yang digunakan dalam praktik, seperti Balanced Scorecard, SAKIP, dan indikator kinerja utama. Tidak hanya itu, disajikan pula pembahasan tentang evaluasi dan pemantauan kinerja, tantangan implementasi, serta studi kasus yang mencerminkan kondisi aktual di Indonesia.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan buku ini, baik berupa masukan, diskusi ilmiah, maupun motivasi. Ucapan terima kasih khusus juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan

mahasiswa yang telah menjadi mitra berpikir kritis dalam pengembangan isi buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna perbaikan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pengukuran kinerja pemerintah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Ponorogo, Mei 2025

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	---

DAFTAR ISI	iii
-------------------------	-----

 BAGIAN PERTAMA PENGERTIAN DAN TUJUAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH	1
---	---

1.1. Pendahuluan	1
1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja Pemerintah	2
1.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah	3
1.4. Pentingnya Pengukuran Kinerja dalam Konteks Pemerintahan	4
1.5. Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah	5
1.6. Rangkuman	6
1.7. Latihan Kuis	7
1.8. Referensi:	9

 BAGIAN KEDUA KONSEP DAN TEORI KINERJA PEMERINTAH	11
---	----

2.1. Pendahuluan	11
2.2. Pengertian Kinerja Pemerintah	11
2.3. Konsep Kinerja Pemerintah	12
2.4. Teori-teori Kinerja Pemerintah	14
2.5. Implikasi Teori Kinerja terhadap Penerapan Kinerja Pemerintah	16
2.6. Rangkuman	17
2.7. Latihan Kuis	18
2.8. Referensi:	20



BAGIAN KETIGA INDIKATOR DAN METODE

PENGUKURAN KINERJA	23
3.1. Pendahuluan	23
3.2. Pengertian Indikator Kinerja.....	23
3.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja	24
3.4. Metode Pengukuran Kinerja	27
3.5. Metode yang Tepat Pengukuran Kinerja Pemerintah	31
3.6. Rangkuman	35
3.7. Latihan Kuis.....	37
3.8. Referensi:	39



BAGIAN KEEMPAT SISTEM PENGUKURAN KINERJA

DI SEKTOR PUBLIK	41
4.1. Pendahuluan	41
4.2. Konsep Sistem Pengukuran Kinerja di Sektor Publik.....	42
4.3. Model dan Pendekatan dalam Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik	45
4.4. Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja di Sektor Publik.....	48
4.5. Rangkuman	50
4.6. Latihan Kuis	51
4.7. Referensi:	55



BAGIAN KELIMA MODEL PENGUKURAN KINERJA:

BALANCED SCORECARD DAN LAINNYA	59
5.1. Pendahuluan	59
5.2. Konsep Balanced Scorecard (BSC)	60
5.3. Model Pengukuran Kinerja Lainnya.....	64
5.4. Penerapan Model Pengukuran Kinerja di Sektor Publik.....	70
5.5. Penelitian Terkait Penerapan Model Pengukuran Kinerja dalam Sektor Publik di Indonesia	72
5.6. Studi Kasus: Penerapan Model Pengukuran Kinerja di Indonesia	73
5.7. Rangkuman	75
5.8. Latihan Kuis	77
5.9. Referensi:	81

BAGIAN KEENAM MODEL EVALUASI DAN PEMANTAUAN KINERJA DALAM ORGANISASI PEMERINTAH 87

6.1.	Pendahuluan	87
6.2.	Konsep Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	87
6.3.	Proses Evaluasi dan Pemantauan Kinerja dalam Organisasi Pemerintah.....	91
6.4.	Metode Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	94
6.5.	Tantangan dalam Evaluasi dan Pemantauan Kinerja di Sektor Publik	98
6.6.	Penerapan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja dalam Organisasi Pemerintah.....	101
6.7.	Rangkuman	104
6.8.	Latihan Kuis	105
6.9.	Referensi:	110

BAGIAN KETUJUH PENGUKURAN KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 115

7.1.	Pendahuluan	115
7.2.	Pengertian Pengukuran Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara	116
7.3.	Tujuan Pengukuran Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara	120
7.4.	Indikator dan Metode Pengukuran Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara	123
7.5.	Peran Pengukuran Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara	128
7.6.	Studi Kasus dan Penerapan Pengukuran Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara	134
7.7.	Rangkuman	139
7.8.	Latihan Kuis	141
7.9.	Referensi:	147

BAGIAN KEDELAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH 151

8.1.	Pendahuluan	151
8.2.	Peran Teknologi dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah	151
8.3.	Teknologi yang Digunakan dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah	160

8.4.	Keuntungan dan Tantangan Penerapan Teknologi dalam Pengukuran Kinerja	171
8.5.	Contoh Penerapan Teknologi dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah	180
8.6.	Masa Depan Teknologi dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah	183
8.7.	Rangkuman	186
8.8.	Latihan Kuis	187
8.9.	Referensi:	192

BAGIAN KESEMBILAN KASUS STUDI PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DI INDONESIA

9.1.	Pendahuluan	195
9.2.	Latar Belakang Pengukuran Kinerja Pemerintah di Indonesia	195
9.3.	Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah di Indonesia	198
9.4.	Studi Kasus Pengukuran Kinerja di Beberapa Sektor Pemerintahan.....	207
9.5.	Tantangan dan Kendala dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah di Indonesia	213
9.6.	Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengukuran Kinerja Pemerintah di Indonesia	215
9.7.	Rangkuman	218
9.8.	Latihan Kuis	218
9.9.	Referensi:	223

BAGIAN KESEPULUH PENGUKURAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK.....

10.1.	Pendahuluan	225
10.2.	Pengertian Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik.....	226
10.3.	Keterkaitan antara Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik.....	229
10.4.	Indikator Pengukuran Kinerja dalam Sektor Publik.....	234
10.5.	Peran Pengukuran Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas	236

10.6.	Tantangan dan Kendala dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Pengukuran Kinerja .	241
10.7.	Studi Kasus Penerapan Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas di Indonesia	243
10.8.	Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik.....	246
10.9.	Rangkuman	248
10.10.	Latihan Kuis	249
10.11.	Referensi:	254

BAGIAN KESEBELAS PERAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....257

11.1.	Pendahuluan	257
11.2.	Pengertian Pengukuran Kinerja dalam Pelayanan Publik.....	258
11.3.	Tujuan Pengukuran Kinerja dalam Pelayanan Publik.....	259
11.4.	Indikator-Indikator Kinerja dalam Pelayanan Publik.....	261
11.5.	Metode Pengukuran Kinerja dalam Pelayanan Publik.....	264
11.6.	Manfaat Pengukuran Kinerja dalam Peningkatan Pelayanan Publik	267
11.7.	Tantangan dalam Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik.....	270
11.8.	Studi Kasus Pengukuran Kinerja dalam Pelayanan Publik di Indonesia.....	272
11.9.	Rangkuman	273
11.10.	Latihan Kuis	274
11.11.	Referensi:	279

BAGIAN KEDUABELAS TANTANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH281

12.1.	Pendahuluan	281
12.2.	Pengertian Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	281
12.3.	Tantangan Umum dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah	283
12.4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja Pemerintah	289

12.5. Tantangan dalam Penentuan Indikator Kinerja ...	294
12.6. Tantangan dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data	299
12.7. Tantangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	302
12.8. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja	306
12.9. Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	310
12.10. Rangkuman	312
12.11. Latihan Kuis.....	313
12.12. Referensi	318



BAGIAN KETIGABELAS PENYUSUNAN LAPORAN

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH	323
13.1. Pendahuluan	323
13.2. Pengertian Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	324
13.3. Tujuan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	325
13.4. Komponen-Komponen dalam Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	331
13.5. Proses Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	333
13.6. Tantangan dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	336
13.7. Rekomendasi untuk Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah	338
13.8. Studi Kasus: Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja di Indonesia	340
13.9. Rangkuman	342
13.10. Latihan Kuis.....	343
13.11. Referensi:	348
DAFTAR PUSTAKA.....	351
BIODATA PENULIS	359

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2018). *Akuntabilitas sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Alkin, M. C., & Christie, C. A. (2004). *Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences*. Sage Publications.
- Altarawneh, M., Al-Tahat, M., & Alshurideh, M. (2020). Data quality and governance: A study on public sector. *International Journal of Public Administration*, 43(9), 775–784. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1646813>
- Andersen, M. S. (2010). *Performance measurement and accountability in the public sector*. Springer.
- Armstrong, M. (2006). *Performance management: Key strategies and practical guidelines* (3rd ed.). Kogan Page.
- Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. *Journal of Management*, 25(3), 293–315. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(99\)00004-5](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)00004-5)
- Ariani, D. R., & Sutaryo. (2013). *Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Manajemen sektor publik*. Erlangga.
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public*

- Administration Review*, 63(5), 586–606.
<https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322>
- Binnendijk, A. (2000). *Results-based monitoring and evaluation in the public sector*. World Bank.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). *Public accountability: A study of the political economy of the modern state*. Oxford University Press.
- BPKP. (2021). *Petunjuk teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)*. Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond the productivity paradox. *Communications of the ACM*, 43(9), 66–77.
<https://doi.org/10.1145/345124.345181>
- Cameron, E., & Green, M. (2015). *Organizational change: An action-oriented toolkit*. Kogan Page.
- Carter, N., & Nash, C. (2015). *Managing public services*. Sage Publications.
- Chien, H., Lee, J., & Ho, C. (2012). The role of information technology in public sector management. *International Journal of Public Sector Management*, 25(4), 314–330.
<https://doi.org/10.1108/09513551211250826>
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business Press.
- Deloitte. (2017). *Global digital infrastructure survey*. Deloitte Global. <https://www2.deloitte.com/global>
- Direktorat Akuntabilitas Aparatur Pemerintah. (2021). *Laporan kinerja instansi pemerintah: Pedoman penyusunan LKjIP sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021*. Kementerian PANRB.
- Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. (2021). *Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan*

- pemerintah daerah tahun 2021*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Fawzi, I., & Ariyanti, P. (2018). *Evaluasi kinerja pelayanan publik di Indonesia*. Pustaka Universitas.
- Fung, A. (2012). *Public administration and policy*. John Wiley & Sons.
- Gaspersz, V. (2012). *All in one balanced scorecard*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gershon, P. (2015). *Public sector performance and accountability: Challenges for the 21st century*. Routledge.
- Goh, C. F. (2012). *Strategic human resource management*. Routledge.
- Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). *Governance: A GAIA perspective*. Institute on Governance.
- Hadi, S. (2016). *Evaluasi kinerja pemerintah daerah: Konsep, indikator dan implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Harrison, J. (2011). *Digital government: Technology and public administration in the twenty-first century*. Routledge.
- Hatry, H. P. (2006). *Performance measurement: Getting results* (2nd ed.). Urban Institute Press.
- Heeks, R. (2010). *Information and communication technologies for development: Theories and practice*. Routledge.
- Hood, C. (2006). *Public management: The new economy and the new public management*. Palgrave Macmillan.
- Hood, C. (2006). Transparency in public sector management. *Public Administration Review*, 66(3), 417–431.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Press.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). *Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996–2008*. World Bank.

- Kementerian PANRB. (2017). *Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. Kementerian PANRB.
- Kettl, D. F. (2005). *The global public management revolution* (2nd ed.). Brookings Institution Press.
- Kettunen, P. (2021). Public sector performance management: A systematic review. *Public Administration Quarterly*, 45(1), 1–21.
- Kim, S., & Lee, J. (2012). Public sector reform in developing countries: The role of political leadership. *International Review of Public Administration*, 17(2), 91–114.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business Review Press.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system*. World Bank.
- LAN. (2020). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- LAN. (2021). *Reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- LAN. (2022). *Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lapsley, I. (2009). New public management: The cruellest invention of the human spirit? *Abacus*, 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x>
- Lienert, I. (2003). Civil service reform in developing countries. *IMF Working Paper WP/03/23*. <https://doi.org/10.5089/9781451843029.001>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- McCourt, W., & Eldridge, D. (2003). Global human resource management: Managing people in developing and transitional countries. *Edward Elgar Publishing*.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moeheriono. (2012). *Indikator kinerja individu dan organisasi*. RajaGrafindo Persada.
- Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management: Constructing information and reform*. Georgetown University Press.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Nasucha, C. Y. (2004). *Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik*. Grasindo.
- National Audit Office. (2003). *Getting the evidence: Using performance information to improve government decision making*. NAO, UK.
- OECD. (2002). *Public sector modernization: A new agenda*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Pandey, I. M. (2004). *Financial management*. Vikas Publishing.
- Pandey, S. K., & Moynihan, D. P. (2006). Bureaucratic red tape and organizational performance. *American Review of Public Administration*, 36(3), 274–290.
- Pasolong, H. (2016). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Poister, T. H. (2003). *Measuring performance in public and nonprofit organizations*. Jossey-Bass.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.
- Republic of Indonesia. (2009). *Law No. 25 of 2009 concerning public services*.

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Rubin, I. S. (2013). *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing* (7th ed.). CQ Press.
- Saefullah, A. (2020). *Penerapan good governance dalam administrasi publik*. Prenadamedia Group.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non-profit*. Grasindo.
- Schacter, M. (2000). *Public sector reform in developing countries: Issues, lessons and future directions*. Canadian International Development Agency.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.
- Setiawan, H. (2016). *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Mitra Wacana Media.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior* (4th ed.). Free Press.
- Smith, R. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations*. Jossey-Bass.
- Soesilo, A. (2021). *Tata kelola pemerintahan dan kinerja organisasi sektor publik*. Penerbit Ombak.
- Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? *American Review of Public Administration*, 36(1), 41–57. <https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
- Talbot, C. (2010). *Theories of performance: Organizational and service improvement in the public domain*. Oxford University Press.
- Thoenig, J. C. (2003). Institutional theories and public institutions. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of public administration* (pp. 127–137). Sage Publications.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Oxford University Press.

Wright, B. E. (2004). The role of work context in work motivation: A public sector application of goal and social cognitive theories. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(1), 59–78.

Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

BIODATA PENULIS



Dendy Eta Mirlana, S.E., M.A.P.

Lahir di Magetan pada tanggal 6 Agustus 1974. Saat ini menjabat sebagai Dosen DPK LLDIKTI Wilayah VII dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN): 0006087409. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Kepuhrejo 1 Takeran, Magetan (1987), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Takeran, Magetan (1987-1990), dan SMA Negeri Kawedanan, Magetan (1990-1993)

Pendidikan tinggi ditempuh di STIE Malangucecwara Malang dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (1998), dilanjutkan dengan program Akta IV di STAIM Madiun (2001), serta gelar Magister Administrasi Publik diperoleh dari Pascasarjana Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang (2007).

Aktif mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, antara lain sejak tahun 2002 hingga sekarang sebagai dosen di Universitas Merdeka (UNMER) Malang – PDKU Ponorogo Program Studi Administrasi Publik. dosen di Akademi Manajemen Koperasi "TANTULAR" Madiun, mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Madiun tahun 2018 dan beberapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen di Madiun (2000-2003).

Selain pengalaman akademik, memiliki rekam jejak kerja di sektor pemerintahan dan swasta. Pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2010-2022) dan di Kementerian Agama Kota Batu (2002-2010). Pengalaman di sektor swasta antara lain pernah bekerja

di perusahaan konsultan engineering di Yogyakarta dan Surabaya (1999–2002).

Pengukuran Kinerja Pemerintah

Buku ajar ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang teori, model, dan praktik pengukuran kinerja di sektor publik, khususnya pemerintahan. Disusun secara sistematis dalam 13 bagian, buku ini membahas mulai dari konsep dasar, sistem, dan pendekatan pengukuran kinerja; penerapan Balanced Scorecard; hubungan antara kinerja dan pengelolaan keuangan negara; hingga evaluasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Melalui studi kasus nyata, tantangan implementatif, dan latihan soal, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan teoretis, tetapi juga membekali mahasiswa dan praktisi dengan keterampilan analitis dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Cocok digunakan sebagai referensi utama dalam perkuliahan S1 Administrasi Publik dan relevan bagi siapa saja yang tertarik pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berbasis hasil.